



**Bupati Karanganyar Siap  
Diperiksa Kejaksaan  
Tinggi Jawa Tengah**

Jaksa penuntut umum Istiyana Joni mengatakan Bupati Rina dan suaminya, Toni, menerima uang hasil korupsi Rp 11,13 miliar.

**HALAMAN B2**

**Bukti Baru untuk Gelar  
Pahlawan Nasional  
Pakubuwono X**

Panitia pengusul gelar pahlawan nasional untuk Pakubuwono X menyiapkan bukti perjuangan Pakubuwono X merintis kemerdekaan Indonesia.

**HALAMAN B8**

# Uang Pembayaran Tanah Lenyap di Rekening Bank Mandiri

Bank Mandiri didesak membuka informasi transaksi siluman.

**SEMARANG** — Puluhan warga Kelurahan Jatirunggo, Ungaran, Kabupaten Semarang, menggelar unjuk rasa kemarin gara-gara uang pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik mereka di rekening Bank Mandiri tiba-tiba raib. Mereka tak tahu ke mana larinya uang pengganti yang sudah dibayarkan tim pembebasan tanah jalan tol Semarang-Solo itu. Lahan mereka dibeli tim pembebasan tanah sebagai pengganti lahan hutan di Penggaron seluas 22,4 hektare, yang digusur untuk proyek jalan tol itu.

Warga mendatangi kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan membawa poster untuk meminta bantuan agar mendesak Bank Mandiri membuka informasi larinya uang pembayaran ganti rugi itu. "Ada 99 warga yang uangnya di rekening Bank Mandiri hilang. Nilai seluruhnya Rp 13,5 miliar," kata Hari Purwanto, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Serikat Konstituen Indonesia, yang mendampingi warga Jatirunggo.

Warga membawa bukti buku rekening Bank Mandiri. Suparno, misalnya, yang memiliki lahan seluas 1.350 meter persegi, seharusnya memegang uang Rp 61 juta. Tapi uang Rp 61 juta yang tercantum dalam buku rekening tak bisa dicairkan. "Kami rakyat kecil, kenapa dipermainkan seperti ini," kata Suparno, yang lahannya dihargai Rp 50 ribu per meter persegi.

Suparno menyatakan penyerahan buku rekening Bank Mandiri, yang dibuat secara massal pada 29 April lalu, dilakukan di kantor kepala de-

sa dan disaksikan pejabat kelurahan serta kecamatan. Saat itu, dalam keterangan di buku rekening, ada transaksi uang masuk ke rekening warga, yang besarnya sesuai dengan harga luas lahan masing-masing.

Tapi, pada 30 April lalu, tiba-tiba ada transaksi penarikan uang itu, yang hanya menyisakan saldo Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu. Dalam *print-out* di buku rekening menunjukkan semua transaksi berkode 3, yakni transaksi penarikan dana (*over booking*). Hari menyatakan ada dua warga yang sempat mencairkan pembayaran ganti rugi itu pada 29 April sore. "Dua warga ini masih bisa mendapatkan dana pembayaran," ujar Hari.

Sebaliknya, warga yang datang ke Bank Mandiri pada 30 April gigit jari karena uang miliknya tak ada. Warga sudah mencoba menanyakan lenyapnya uang mereka kepada pihak bank. Tapi hingga kini janji pertemuan belum pernah direalisasi Bank Mandiri. Keinginan warga meminta data kliring juga ditolak Bank Mandiri. Padahal dokumen sertifikat asli tanah milik warga juga sudah diserahkan ke tim pembebasan tanah. Akibatnya, warga sangat khawatir dana pembayaran tanah itu bakal hilang.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Rahmulyo Adiwibowo meminta warga mengajukan berkas resmi mengenai permasalahan mereka. "Nanti akan kita tindak lanjuti," kata Bowo di depan warga. Menurut Bowo, Bank Mandiri termasuk badan publik, sehingga wajib membuka informasi luas kepada masyarakat. Informasi itu untuk mengetahui ke mana larinya uang pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. "Kalau ditutup-tutupi, ada

sanksi pidananya," ujar Bowo.

Kepala Bank Mandiri Kantor Wilayah VII Jawa Tengah/DIY Budi J. Siahaan menyatakan siap menerima keluhan nasabah yang merasa kehilangan uang di rekeningnya. "Kami siap terbuka dengan nasabah," kata Budi. Syaratnya, mereka pemilik rekening dan tak diwakili pihak lain. "Tunjukkan nama dan nomor rekeningnya, akan kita la-

yani."

Budi menjamin seluruh transaksi di Bank Mandiri dilakukan sesuai dengan persyaratan. Tak akan mungkin ada transaksi jika tak ada permintaan dari nasabah karena dokumen di Bank Mandiri tertutup. "Transaksi di bank itu rahasia banget," ujarnya. "Semua itu pasti bisa ditelusuri."

Deputy Regional Manager Kan-

tor Wilayah VII Bank Mandiri Arnold mengakui beberapa waktu lalu memang ada beberapa orang yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat mengirim surat permintaan transaksi beberapa nasabah Bank Mandiri. "Tapi, karena siapa saja pemilik rekeningnya tak jelas, maka tidak diberi," kata Arnold.

● ROFIUDDIN



**Pemilu di Sekolah**

Seorang pemilih memasukkan surat suaranya di TPS 3 di gedung SDN Wringinanom, Kertek, Wonosobo, kemarin. Semua sekolah dan dinas pemerintahan diliburkan untuk menyukseskan pemilukada, yang diikuti lima pasang calon bupati dan wakilnya.

# Perang terhadap Narkoba Hingga Rukun Tetangga

**YOGYAKARTA** — Perang terhadap narkotik dan obat terlarang akan dilakukan di tingkat hingga ke wilayah rukun tetangga dan rukun warga lewat pengurus gerakan antinarkoba di RT dan RW. "Gerakan antinarkoba akan jadi gerakan rakyat untuk mengkampanyekan penyelamatan kader bangsa," kata Ketua Gerakan Anti-Narkoba Nasional (Gannas) DIY Sigit Sugito saat beraudiensi dengan anggota

DPRD DIY di gedung Dewan kemarin.

Menurut Sigit, kepengurusan gerakan antinarkoba ini akan diterapkan di seluruh wilayah DIY, yang memiliki kasus penggunaan narkoba sebanyak 691. Dalam gerakan ini, masyarakat dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotik.

Usul lainnya adalah memberi-

kan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada komunitas masyarakat petani dan nelayan. Sebagaimana di wilayah Gunungkidul, yang berbatasan dengan wilayah pantai yang panjang, yang memungkinkan terjadinya lalu lintas laut antarnegara atau daerah secara diam-diam. "Sosialisasi buat nelayan perlu untuk mencegah masuknya narkoba dari kawasan pantai," kata Ketua Gannas Gunungki-

dul Sarwanto.

Gerakan antinarkoba juga memanfaatkan kegiatan olahraga dan seni sebagai media kampanye antinarkoba. Kegiatan ini, misalnya, dilakukan lewat lukisan mural, pentas kolaborasi seni budaya, dan olahraga di sepanjang jalan di kawasan Malioboro, yang tengah disiapkan Gannas.

Anggota Dewan menyatakan dukungannya atas gagasan itu. Tapi

mereka menyarankan, kepengurusan gerakan antinarkoba nasional tidak perlu dibentuk di seluruh wilayah rukun tetangga dan rukun warga karena dinilai tidak efektif. Lebih baik membuat peta wilayah mana yang rentan peredaran narkoba, seperti kawasan pemondokan mahasiswa. "Di sanalah kepengurusan itu dibentuk," kata anggota Dewan, Arif Rahman Hakim.

● PITO AGUSTIN RUDIANA